



**PEMKAB
LAMONGAN**

2023 LKJIP

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Mastrip No. 61 Lamongan - 62216
(telp) 0322[-321170
e-mail :
pubmrg@lamongankab.go.id
website : lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 pada dasarnya merupakan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) yaitu gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Kebinamargaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Harapan kami, semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2024

Pit. KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN


SUJARWO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1974093 200112 1 005



DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi	3
C. Data Umum Organisasi.....	13
D. Sistematika Penulisan LKjIP	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis.....	19
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
A.1 Pencapaian Kinerja	27
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	28
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai akhir Periode RPJMD/RENSTRA	29
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	34
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan.....	34
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	36
A.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	38
B. Realisasi anggaran	38
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja 2023
- Penghargaan dan Inovasi



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2023 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik/ sangat berhasil dengan total capaian Indeks Infrastruktur Jalan sebesar 102,22 dan Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan sebesar 96,80%. Sedangkan total capaian indeks Infrastruktur Jembatan sebesar 103,66% serta Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan



Capaian Kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Namun, terdapat penurunan pada capaian di tahun 2023 yang disebabkan beberapa faktor berikut: 1) adanya penurunan anggaran, yang awalnya diperkirakan mencapai 140 Miliar menjadi 129 Miliar dan terealisasi hanya 99 Miliar Rupiah; 2) Tingkat curah hujan yang tinggi diakhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 yang menggenangi jalan-jalan kabupaten sehingga mempercepat kerusakan jalan; 3) Banyak kendaraan berat melebihi kapasitas yang melalui jalan kabupaten; 4) Adanya ketidaktercapaian target tahun 2022 berimbas di tahun 2023. Target di tahun 2022 yang terlalu tinggi yaitu 80,86 Km, sehingga masih memiliki hutang ditahun 2022 sehingga target 2023 menjadi 42,243 Km terealisasi 23,011 Km. Secara umum capaian dinas PU Bina Marga pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

Keberhasilan yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala atau hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor: XI/ MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas



instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan berperan pada bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan. Arah Kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2021-2026 diimplementasikan dalam program prioritas mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

a. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

b. Tujuan

Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan yang bernuansa multidimensional, maka diperlukan manajemen pembangunan yang lebih memadai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung kegiatan Perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas pedesaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan .
3. Meningkatkan kondisi dan fungsi jalan dan jembatan,.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan

2. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub Bidang Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,



pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Jalan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Jembatan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Sarana Prasarana Kebinamargaan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas pokok dan Fungsi

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki fungsi:

- a. Perencanaan strategis dan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;



- c. Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum bina marga;
 - d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - f. Pembinaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;



- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyiapan dan organisasi penatalaksanaan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;



- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis Pembangunan dan peningkatan jalan, serta pemeliharaan rutin.

Pengelolaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kabupaten dan jalan poros strategis.

Bidang penyelenggaraan jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
- b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
- d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengelolaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



4. Bidang Pengelolaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis Pembangunan dan peningkatan jembatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jembatan, serta pemeliharaan rutin jembatan.

Bidang Pengelolaan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengelolaan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Sarana dan Prasarana Kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan peralatan dan pembekalan.



Bidang Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Sarana dan Prasarana jalan;
- b. Pengawasan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan termasuk manajemen pengelolaannya;
- d. Pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang terkait Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana Prasarana Kebinamagraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan



dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Secara rinci bagan struktur organisasi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut:





3. Data Umum Organisasi

1. Personil

Sampai dengan akhir bulan Desember 2023, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sebanyak **96** orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak **41** orang dan Pegawai Kontrak sebanyak **55** orang. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan golongan adalah sebagaimana tersebut.

Tabel 1.1 Data Pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	PNS	5	26	10	-	41
2	Tenaga Kontrak Kerja					55
Jumlah						96

Data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan Eselon adalah sebagaimana tersebut.

Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan Eselon

No	Uraian				Staf	Jml
		II	III	IV		
1	Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan	1	4	8	28	41
	Jumlah	1	4	8	41	41

Sedangkan Data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut.



**Tabel 1.3 Data Pegawai di Lingkungan
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN								Jml
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan	-	-	14	-	-	-	22	5	41
Jumlah		-	-	14	-	-	-	22	5	41

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventarisasi, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan	1	Luas = 1.105 M ²
2	Tanah Sawah	1	Luas = 15.006,00 M ²
3	Tanah Jalan	72	Luas = 1.584.376,10
4	Bangunan Laboratorium	1 Unit	Luas = 77 M ²
5	Bangunan Gudang	1 Unit	Luas = 290 M ²
6	Bangunan Kantor	1 Unit	Luas = 413 M ²
7	Gudang Terbuka	2 Unit	Luas = 478 M ²
8	Bangunan Musholla	1 Unit	Luas = 121 M ²
9	Panjang Jalan	665,116 Km	
10	Bangunan Jembatan	256 Bh	
11	Bangunan Gorong-gorong :		
	~ Dalam Kota	20 Bh	
	~ Luar Kota (Bangunan)	137 Bh	
12	Generator	2 Bh	Baik



13	Vibrator Roller	2	Bh	Baik
14	Mobil PICK-UP	7	Bh	6 Baik ; 1 Rusak Ringan
15	Station Wagon	8	Bh	7 Baik, 1 Rusak Ringan
16	Mobil Beban / Truck	4	Unit	4 Baik
17	Sepeda Motor	14	Bh	12 Baik ; 2 Rusak Ringan
18	Walles /Three Whell Roller	11	Bh	11 Baik
19	Mesin Ketik	4	Bh	Rusak Berat
20	Almari Kayu	8	Bh	Rusak Berat
21	Almari Besi	33	Bh	20 Baik ; 10 Rusak Ringan; 3 Rusak Berat
22	Meja Tulis Kayu	44	Bh	36 Cukup Baik; 8 Rusak Ringan
23	Meja Komputer	3	Bh	Baik
24	Meja Kerja	95	Bh	Baik
25	Kursi tamu	3	Set	3 Baik
26	Kursi Putar	19	Bh	19 Baik
27	Kursi Lipat	82	Bh	82 Baik
28	Kursi Kerja	91	Bh	91 Baik
29	Kipas Angin	2	Bh	Baik
30	Meja Gambar	2	Bh	1 Rusak Berat ; 1 Baik
31	CPU Monitor (original)	5	Bh	Baik
32	PC	50	Unit	50 Baik
33	Note Book	43	Unit	20 Baik, 23 Rusak Berat
34	AC	32	Unit	28 Baik ; 4 Kurang Baik
35	Printer	77	Bh	60 Baik ; 10 Rusak Ringan, 7 Rusak Berat
36	Pesawat Telpon	6	Bh	Rusak Berat
37	Mesin Cetak gambar	1	Bh	Baik
38	Panaboard	1	Bh	Baik
39	Almari Katalog	1	Bh	Baik
40	Almari Pesawat TV	1	Bh	Rusak Ringan
41	Kotak Kunci	1	Bh	Baik
42	Filling Gambar	3	Bh	Rusak Berat
43	Rak Arsip	6	Bh	Baik
44	Bufet	4	Bh	Baik



45	Filing Kabinet	40	Bh	30 Baik ; 10 Rusak Ringan
46	Vidio Record	1	Bh	Baik
47	Faximile	2	Bh	Rusak
48	Amplifier	3	Bh	Baik
49	Warles	1	Bh	Baik
50	Pompa Air	1	Bh	Baik
51	Almari Vibrator	3	Bh	Baik
52	Band Kas	5	Bh	Rusak Ringan
53	Jam Dinding	10	Bh	Baik
54	Stafolt	4	Bh	Baik
55	Televisi	6	Bh	4 Baik ; 2 Rusak Berat
56	White Board	3	Bh	3 Baik
57	Kamera	35	Bh	12 Baik ; 13 Rusak Ringan ; 10 Rusak
58	USB Stabilise	3	Bh	Baik
59	Handy Came	2	Bh	2 Rusak Ringan
60	Hummer Tes	3	Bh	Baik
61	Potong Rumput	18	Bh	Baik
62	Mesin Potong Pohon	10	Bh	10 Baik
63	Roll Meter	4	Bh	Rusak Ringan
64	Handy Talky	3	Bh	Baik
65	Genset	3	Bh	2 Baik ; 1 Rusak Berat
66	Gps	1	Bh	Baik
67	Alat Laboratotium Bahan Bangunan Konstruksi	2	Unit	Baik
68	Meja Rapat	7	Unit	4 Baik ; 3 Rusak Ringan

1. Pembiayaan

Guna mencapai Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2023, dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 1.5 Anggaran Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten
Lamongan 2023**

NO.	U R A I A N		JUMLAH	KET
I.	APBD Kabupaten			
1.	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	Rp. Rp.	<u>4.800.576.450,00</u> 4.800.576.450,00	
2.	Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan jasa c. Belanja Modal	Rp. Rp. Rp.	<u>125.099.792.200,00</u> 812.148.000,00 18.127.751.542,00 106.159.892.658,00	
	J U M L A H	Rp.	<u>129.099.792.200,00</u>	

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, rencana Kinerja serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



4. Membandingkan realisasi kinerja ta
5. hun ini dengan standart nasional (Jika ada).
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

1. Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan, visi juga merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi, sehingga Visi dapat memberikan petunjuk kearah mana kita menuju dan seperti apa keadaan yang akan terwujud dimasa yang akan datang.

Visi Kabupaten Lamongan yakni, “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan” maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai perangkat Daerah, merupakan komponen utama bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan masyarakat Lamongan yang Dinamis, mandiri, dan responsive terhadap perubahan, serta lebih meningkat kesejahteraannya dengan terpenuhinya infrastruktur yang layak dan memadai.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan akan lebih tanggap dalam menyingkapi dinamika perubahan keadaan kearah penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen unit kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menuju Pemerintahan yang baik, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (Kinerja) organisasi.



2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang ingin dicapai, membawa suatu organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai tujuan.

Dalam penjabaran di atas perumusan Misi, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan mengemban tugas pada misi yang ke tiga yakni “Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan“

a) Tujuan

Mewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan bernuansa multidimensional. Oleh karena itu diperlukan manajemen pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrstruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

b) Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan yakni Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. Dalam menyusun Indikator Kinerja disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamonganmmmm menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur Jalan
2. Indeks Infrastruktur Jembatan



3. Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga

B. Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

**Table 2.1 Rencana Kerja Tahunan
Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infarstruktur Jalan	81,62
		Indeks Infrastruktur Jembatan	77,54
		Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,28

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023.

a) Program dan Kegiatan:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.483.648.200,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	70.000.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.807.676.450,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	179.824.000,00



4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	560.675.950,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	119.514.500,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.025.924.150,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	720.033.150,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	122.416.720.450,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	122.416.720.450,00
1.	Pengelolaan Leger Jalan	Rp	832.150.000,00
2.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp	508.000.000,00
3.	Rekonstruksi Jalan	Rp	101.255.776.100,00
4.	Rehabilitasi Jalan	Rp	2.125.417.969,00
5.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp	5.533.026.350,00
6.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	7.600.000.000,00
7.	Penggantian Jembatan	Rp	3.911.899.300,00
8.	Rehabilitasi Jembatan	Rp	2.075.868.700,00
9.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp	700.000.000,00

**Tabel 2.2 Sasaran dan Program
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks	81,62
Prosentase Kementapan Infrastruktur Jalan			%	90,33%	
Indeks Infrastruktur Jembatan			Indeks	77,54	



			Prosentase Kemandapan Infrastruktur Jembatan	%	80,10%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	Nilai	85,28
			Nilai IKM Internal dinas PU Bina Marga	Nilai	87

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a) Kepala Dinas

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infrastruktur Jalan	81,62
		Indeks Infrastruktur Jembatan	77,54
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,28

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 122.416.720.450,00	APBD, DAK, BK-PROP, dan BKK
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.483.648.200,00	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 129.900.368.650,00	

b) Sekretaris Dinas

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Laporan	100,00 %



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Keuangan Tepat Waktu	
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00 %
3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang disiplin	100,00 %
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100,00 %
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	100,00 %
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	100,00 %
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit Kerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100,00 %

Jumlah Anggaran Kegiatan (Sub Kegiatan) Tahun 2023 sebesar: Rp. 7.483.648.200,00

a) Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.807.676.450,00	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.824.000,00	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.675.950,00	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.514.500,00	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.924.150,00	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.033.150,00	APBD



c) Kepala Bidang Pengelolaan Jalan

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kuantitas Jalan	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	90,33 %

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023 sebesar:
Rp.106.788.802.450,00

KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1. Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 106.788.802.450,00	APBD,DAK, BKPROV dan BKK
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 106.788.802.450,00	

d) Kepala Bidang Pengolaan Jembatan

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kuantitas jembatan.	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	80,10 %

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2023 sebesar Rp. 6.687.768.000,00

KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1 Penyelenggaran Jalan Kabupaten/ Kota	Rp. 6.687.768.000,00	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 6.687.768.000,00	



e) Kepala Bidang Sarana Prasarana Kebinamargaan

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sarana Prasarana Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan .	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana yang Tercapai	6 Dokumen
			3 Unit

	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Pengelolaan Leger Jalan	Rp. 832.150.000	APBD
2.	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp. 508.000.000	APBD
3.	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 50.000.000	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 1.390.150.000	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang kebinamargaan dapat dilihat dari meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan meningkatnya Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.

Secara garis besar dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis untuk tahun 2023 dari segi *Output* seluruhnya telah dapat dilaksanakan sedangkan dari segi *Outcome* beberapa indikator belum dapat dihitung. Hal ini karena belum tersedianya data kinerja, yang saat ini masih dalam taraf pengembangan ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

A. 1 Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2023

Pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Adapun Tabel Pencapaian Kinerja disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2023
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Th. 2023 (%)
Meningkatnya kualitas dan	Indeks Infrastruktur Jalan	81,62	83,43	102,92
	Indeks Infrastruktur Jembatan	80,10	80,38	103,66



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Th. 2023 (%)
kuantitas jalan dan jembatan	Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga	85,28	87,55	102,6

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian prosentase Indeks Infrastruktur Jalan sebesar 102,92% hal ini menunjukkan tercapainya target indikator sasaran kinerja tahun 2023 dengan realisasi sebesar 83,43% atau melampaui target. Indeks Infrastruktur Jembatan mencapai 80,10%, menunjukkan bahwa target indikator kinerja tahun 2023 tercapai, bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 80,38%. Sedangkan terkait Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga Tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar 85,25%, sedangkan realisasi sebesar 87,55%, dan capaian kinerja sebesar 102,6%.

A. 2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Keberhasilan suatu Institusi dalam mengemban tugas dapat diukur dari sejauh mana institusi tersebut dapat merealisasikan program-programnya sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan kinerja. Indikator dan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infrastruktur Jalan	80,74	82,18	101,78	81,62	83,43	102,22
		Indeks Infrastruktur Jembatan	76,10	79,51	104,60	77,54	80,38	103,66
		Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga	85,03	87,43	102,82	85,28	87,55	102,6



Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indeks Infrastruktur Jalan dari tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan adalah sebesar 80,74 dengan realisasi sebesar 82,18, serta capaian sebanyak 101,78%. Pada tahun berikutnya, meskipun target sedikit meningkat menjadi 81,62% dengan realisasi tercatat sebesar 83,43% serta capaian sebesar 102,22%. Sementara itu, untuk Indeks Infrastruktur Jembatan, capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang semula 104,60 menjadi 103,66.

Indeks infrastruktur jembatan pada tahun 2022 sebesar 76,10%, dengan realisasi yang meningkat menjadi 79,51%, serta capaian sebesar 104,60%. Sementara itu, pada tahun 2023, target untuk Indeks Infrastruktur Jembatan ditetapkan sebesar 77,54%, dengan realisasi sebesar 80,38%, serta capaian kinerja sebesar 103,66%. Hal ini menandakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan upaya yang efektif dalam mencapai sasaran strategis pada sektor tersebut. Sementara itu, Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga pada tahun 2022 ditetapkan dengan target sebesar 85,03, dan realisasi sebesar 87,43, serta capaian sebesar 102,82 sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 85,28, dan realisasi sebesar 87,55, serta capaian sebesar 102,6.

A. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Priode RPJMD/ RENSTRA

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.



Adapun hasil evaluasi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Tabel 3.3 Capaian Dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023**

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan
Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2022			Tahun 2023			PD yang menanganikan Urusan
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	1	Indeks Infarstruktur Jalan	1. Menghitung persentase panjang jalan kondisi mantap 2. Menghitung score 3. Pembobotan score	Indeks	79.05	80.74	82.18	101.8%	81,62	83,43	102,22%	Dinas PU Bina Marga
		2	Indeks Infrastruktur Jembatan	1. Menghitung persentase unit jembatan kondisi mantap 2. Menghitung score 3. Pembobotan score	Indeks	78.69	76.10	79.51	104.5%	77,54	80,38	103,66%	
	<u>Program :</u> Program Penyelenggaraan Jalan	1	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang jalan kabupaten}} \times 100$	%	84.20%	89.01%	83.98%	94.35%	90,33%	87,44%	96,80%	
		2	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100$	%	83.22%	77.23%	77.23 %	100%	80,10%	80,10%	100,00%	
	<u>Sasaran:</u> Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	1	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja,	Nilai	84,78	85,03	87,43	102,82	85,28	87,55	102,6	



No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2022			Tahun 2023			PD yang menanganikan Urusan
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, internal, dan pencapaian kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat									
	<u>Program :</u> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2	Nilai IKM Dinas PU Bina Marga	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah dengan melakukan survey kepada 100 orang terhadap 9 variabel pelayanan yakni: 1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan 3. Waktu pelayanan 4. Biaya pelayanan 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Maklumat pelaksana 9. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Nilai	84	86	86,04	100,05	-	87,22	100,25	



SASARAN 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan**Indikator Kinerja 1** Indeks Infarstruktur Jalan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 5 (lima) sub kegiatan yakni: 1) Pengelolaan Leger Jalan; 2) Survei Kondisi Jalan/Jembatan; 3) Rekonstruksi Jalan; 4) Pemeliharaan Berkala Jalan; 5) Pemeliharaan Rutin Jalan;

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Indeks Infarstruktur Jalan	81,62	83,43

Indeks infrastruktur jalan pada tahun 2023 adalah mencapai 83,43% dari target 81,62% sebagaimana pada keterangan tabel diatas.

SASARAN 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan**Indikator Kinerja 2** Indeks Infrastruktur Jembatan

Prosentase jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 3 (tiga) sub kegiatan yakni 1) Penggantian Jembatan; 2) Rehabilitasi Jembatan; dan, 3) Pemeliharaan Rutin Jembatan;.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Indeks Infrastruktur Jembatan	77,54	80,38

Peningkatan Jumlah Jembatan Kabupaten pada tahun 2023 adalah mencapai 80,38% dari target 77,54%. Sebagaimana di pada tabel diatas.

SASARAN 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan**Indikator Kinerja 3** Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga

Prosentase nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, internal, dan pencapaian kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,28	87,55

Realisasi Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga pada tahun 2023 sebesar 87,55 adapun targetnya sebesar 85,28 sebagaimana pada tabel diatas.

A. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Realisasi kinerja ini membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan realisasi nasional. Namun di tahun 2023 ini nihil atau tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

A. 5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan BKPROV Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan. Adapun Indikator kinerja sasaran Dinas PU Bina Marga dijelaskan sebagai berikut:

- a) Indeks Infrastruktur Jalan dengan target 81,62%;
- b) Indeks Infrastruktur Jembatan dengan target 77,54%;
- c) Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga dengan target 85,28%;



Indeks infrastruktur jalan yang semula ditargetkan mencapai 81,62 terealisasi sebesar 83,43. Indeks Infrastruktur Jembatan yang semula ditargetkan mencapai 77,54 terealisasi sebesar 80,38. Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga yang semula ditargetkan sebesar 85,28 sedangkan realisasi belum diketahui. Secara keseluruhan indikator kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun terdapat beberapa penurunan realisasi di tahun 2023. Adapun penurunan tersebut terdapat pada prosentase jalan dalam kondisi mantap yang ditargetkan 90,33% hanya terealisasi sebesar 87,44% atau tidak tercapai sebesar 2,89%. Sedangkan jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari target 42, 243 Km hanya terealisasi 23.011 Km atau kurang 19,232 Km dari target. Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- 1) Dari segi anggaran, yang awalnya diperkirakan mencapai 140 Miliar dan telah disesuaikan dengan perhitungan, ternyata tidak sesuai dengan anggaran yang didapat tahun 2023 sebesar 129 Miliar dan terealisasi hanya 99 Miliar Rupiah.
- 2) Curah hujan yang tinggi diakhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 yang menggenangi jalan-jalan kabupaten sehingga mempercepat kerusakan jalan.
- 3) Banyak kendaraan berat melebihi kapasitas yang melalui jalan kabupaten
- 4) Adanya ketidaktercapaian target tahun 2022 berimbas di tahun 2023. Target di tahun 2022 yang terlalu tinggi yaitu 80,86 Km, sehingga masih memiliki hutang ditahun 2022 sehingga target 2023 menjadi 42, 243 Km terealisasi 23,011 Km.

Secara garis besar tidak ada penurunan bahkan mengalami peningkatan jika tidak ada permasalahan di atas. Hal yang menentukan nilai Indikator Kinerja Dinas PU Bina Marga tetap positif karena didukung Program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 8 (delapan) sub kegiatan yakni: 1) Pengelolaan Leger Jalan; 2) Survei Kondisi Jalan/Jembatan; 3) Rekonstruksi Jalan; 4) Pemeliharaan Berkala Jalan;



5) Pemeliharaan Rutin Jalan; 6) Penggantian Jembatan; 7) Rehabilitasi Jembatan; dan 8) Pemeliharaan Rutin Jembatan:

1. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a) Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program penyelenggaraan jalan;
 - b) Memastikan alokasi anggaran yang sesuai dengan skala dan urgensi proyek;
 - c) Memilih metode konstruksi yang efisien dan sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan sekitar;
 - d) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan yang optimal sebagai pendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, sehingga jalan menjadi lebih layak untuk dilalui.

Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi program penyelenggaraan jalan sesuai skala prioritasnya;
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan realisasi indikator kinerja;
- c. Koordinasi yang baik antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanganan jalan agar tetap dalam kondisi baik;
- d. Pengadaan alat berat untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tentang peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan.

A.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia, ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis



memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan baik perencanaan maupun pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan menekan beban pembiayaan. Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran kinerja perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel A.6.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi %
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infrastruktur Jalan	102,22%	76,10%	26,12%
		Indeks Infrastruktur Jembatan	103,66%	65,51%	38,15%
		Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga	102,6%	95,33%	7,27%

Dari data di atas dijelaskan bahwa Capaian Kinerja untuk Indeks Infrastruktur Jalan mencapai 102,22%, yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran yang dikeluarkan dengan besaran 76,10% atau dengan efisiensi sebesar 26,12%. Sedangkan Capaian Anggaran untuk Indeks Infrastruktur Jembatan juga tinggi, yaitu sebesar 103,66% dengan Capaian anggaran yang rendah yaitu sebesar 65,51%, dengan efisiensi sebesar 38,15%. Sementara Nilai Sakip Dinas PU Bina Marga dengan Capaian Kinerja juga tinggi, yaitu sebesar 102,6% dengan Capaian anggaran yang rendah yaitu sebesar 95,33%, dengan efisiensi sebesar 7,27%.

Dengan demikian, secara umum, kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan serta jembatan telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat potensi untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan



kualitas infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat.

A.7 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dengan melihat hasil dari Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dan Evaluasi terhadap capaian sasaran dengan cara Pengukuran Pencapaian Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan hasil yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian dengan makna Baik.

Dari hasil tersebut seluruh kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikarenakan kerja keras dan dukungan dari stakeholder dengan tetap memaksimalkan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Prestasi:

Dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat mengevaluasi Indikator Outcome sebagai berikut, yakni: Program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 Kegiatan dan 8 Sub kegiatan masing-masing mencapai prosentase 100%.

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pada tahun 2023 Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 129.900.368.650,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 99.586.271.876 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar



Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 76,66% adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023 dengan alokasi dana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Realisasi Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2023**

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
1					2	3	4	5
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129.900.368.650	99.586.271.876	76,66
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.483.648.200	7.134.131.877	95,33
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	65.873.550	94
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	28.054.650	94
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	8.770.300	88
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.048.600	97
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.807.676.450	4.597.151.404	96
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.792.676.450	4.582.525.704	96
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.254.400	97
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000	7.371.300	98
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.824.000	179.114.000	100
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	49.000.000	48.510.000	99



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
					Beserta Atribut Kelengkapannya			
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.824.000	130.604.000	100
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.675.950	552.054.371	98
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.206.700	32.173.700	100
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.743.400	321.251.000	99
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.349.500	31.344.000	100
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.899.350	56.844.500	100
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.050.000	33.049.100	100
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	54.590.000	99
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.427.000	22.802.071	80
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.514.500	116.628.100	98
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.514.500	116.628.100	98
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.924.150	967.202.840	94
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00	4.600.000,00	100
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.550.000	134.036.890	73
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.626.150	26.595.000	100
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	812.148.000	801.974.950	99
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.033.150	656.103.612	91
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	22.482.500	22.475.000	100



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.887.550	222.701.992	94
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.0000	48.288.620	97
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.500.000	39.927.000	46
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.163.100	322.711.000	100
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	122.416.720.450	92.452.139.999	76
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan leger jalan	832.150.000	698.704.700	84
1	03	10	2.01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	508.000.000	486.689.800	96
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi jalan	101.255.776.100	77.005.283.490	76
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala jalan	5.533.026.350	2.392.477.750	43
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.600.000.000	7.487.613.726	99
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	3.911.899.300	2.723.816.858	69,63
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	2.075.868.700	974.621.734	46,95
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	700.000.000	682.931.941	97,56

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana dalam APBD 2023 pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program/



kegiatan yang di laksanakan, demikian juga untuk mengukur seberapa besar tupoksi yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. Adapaun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direalisasikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 129.900.368.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.586.271.876,00 atau 76,66%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 30.314.096.774,00. Adapun rincian anggaran pembangunan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 65.873.550,00 atau 94,11%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.054.650,00 atau 93,52% dengan prosentase kegiatan 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.770.300,00 atau 87,70% dengan prosentase kegiatan 100%.
- c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar 29.048.600,00 atau 96,83% dengan prosentasi pelaksanaan kegiatan 100%.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.807.676.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.597.151.404,00 atau 95,62% dengan prosentase kegiatan 100% dan terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.792.676.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.582.525.704,00 atau 95,62% dengan prosentase kegiatan 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.254.400,00 atau 96,73% dengan prosentase pelaksanaan kegiatan 100%.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.371.300,00 atau 98,28% dengan prosentase pelaksanaan kegiatan 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 179.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 179.114.000,00 atau 99,22% dengan prosentase pelaksanaan kegiatan 100% dan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.510.000,00 atau 98,58% dengan prosentase fisik 99%.
- b) Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 130.604.000,00 atau 100% dengan prosentase Fisik 99,83%.



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 560.675.950,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 552.054.371,00 atau 99,43%. Dengan Prosentase Kegiatan 98,46% dan terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 32.206.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.173.700,00 atau 99,90% dengan prosentase fisik 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 323.743.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 321.251.000,00 atau 99,23% dengan prosentase fisik 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 31.349.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.344.000,00 atau 99,98% dengan prosentase fisik 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 56.899.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.844.500,00 atau 99,90% dengan prosentase fisik 100%.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 33.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.049.100,00 atau 100% dengan prosentase kegiatan 100%.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.590.000,00 atau 99,25% dengan prosentase kegiatan 100%.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.427.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.802.071,00 atau 80,21% dengan prosentase fisik 100%.



5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 119.514.500,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 116.628.100,00 atau 97,58%. Dengan prosentase kegiatan 100% dan terdiri dari satu Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Mebel, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 119.514.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.628.100,00 atau 97,58%. dengan prosentase kegiatan 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.025.924.150,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 967.206.840,00 atau 94,28% dengan prosentase kegiatan 100% dan terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.600.000,00 atau 100% dengan prosentase kegiatan 100%.
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 182.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 134.036.890,00 atau 73,42% dengan prosentase kegiatan 100%.
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 26.626.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.595.000,00 atau 99,88% dengan prosentase kegiatan 100 %.
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 812.148.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 801.974.950,00 atau 98,75% dengan prosentase fisik 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 720.033.150,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 656.103.612,00 atau 91,14%. Dengan Prosentase Kegiatan 91,12% dan terdiri dari 5 (Lima) Sub Kegiatan:



- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.482.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.475.000,00 atau 99,97% dengan prosentase kegiatan 100 %.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 236.887.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.701.992,00 atau 94,01% dengan prosentase kegiatan 100%.
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.288.620,00 atau 96,58% dengan prosentase kegiatan 100 %.
- d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 86.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.927.000,00 atau 46,16% dengan prosentase fisik 100%.
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 324.163.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.322.711.000,00 atau 99,55% dengan prosentase kegiatan 100%.

b) Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar 122.416.720.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.452.139.999,00 atau 76%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 8 (Delapan) paket kegiatan, yaitu:



- 1) Pengelolaan Leger Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 832.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 698.704.700,00 atau 83,96% dengan prosentase fisik 100%
 1. Pembuatan Leger Jalan Sukodadi – Sumberwudi
 2. Pembuatan Leger Jalan Banjarwati – Petiin
- 2) Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 508.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 486.689.800,00 atau 95,81%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri 4 (Empat) dokumen pekerjaan, meliputi;
 1. Penajaman Data Base Jalan Wilayah Selatan
 2. Penajaman Data Base Jalan Wilayah Utara
 3. Penajaman Data Base Jembatan Wilayah Selatan
 4. Penajaman Data Base Jembatan Wilayah Utara
- 3) Rekonstruksi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.416.720.450 dan terealisasi sebesar Rp. 77.005.283.490,00 atau 76,05 %, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 49 (Empat puluh Sembilan) paket pekerjaan dengan panjang 6.434 Km, meliputi;
 1. Peningkatan Jalan Beru – Tambakboyo
 2. Peningkatan Jalan Deket – Soko
 3. Peningkatan Jalan Guci - Tracal
 4. Peningkatan Jalan Kranji – Payaman
 5. Peningkatan Jalan Mojorejo – Medalem
 6. Peningkatan Jalan Plembon – Sugio
 7. Peningkatan Jalan Sidokumpul – Tunjungmekar
 8. Peningkatan Jalan Sukodadi – Sumberwudi
 9. Peningkatan Jalan Sunan Giri
 10. Peningkatan Jalan Tunjungmekar – Samboppinggir
 11. Peningkatan Jalan Turi – Pucangro
 12. Peningkatan Jalan Warukulon - Lebakadi
 13. Rekontruksi Jalan Sukorame - Sembung
 14. Rekontruksi Jalan Sukorame - Slaji
 15. Peningkatan Jalan Dinoyo - Kentong



16. Peningkatan Jalan Kendalkemlagi - Latukan
17. Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa
18. Peningkatan Jalan Made - Plembon
19. Peningkatan Jalan Mantup - Sambeng
20. Peningkatan Jalan Pahlawan
21. Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Sukorejo
(Rs. Muhamadiyah) - Ngujungrejo
22. Peningkatan Jalan Veteran
23. Peningkatan Jalan Waruwetan - Sungegeneng
24. Peningkatan Jalan Windu - Priyoso
25. Peningkatan Jalan Kiringan - Dibee
26. Peningkatan Jalan Nguwok – Tlanak
27. Peningkatan Jalan Sarirejo - Jatirembe
28. Peningkatan Ruas Jalan Cangkring - Talunrejo
29. Peningkatan Ruas Jalan Mojorejo - Jegreg
30. Rekonstruksi Jalan Baturono - Kembangbahu
31. Rekonstruksi Jalan Brengkok - Durikulon
32. Rekonstruksi Jalan Bulumargi - Datinawong
33. Rekonstruksi Jalan Gampang - Petiin
34. Rekonstruksi Jalan Kalen - Jatipayak
35. Rekonstruksi Jalan Keben - Banjarmasinu
36. Rekonstruksi Jalan Kedungdadi - Kradenanrejo
37. Rekonstruksi Jalan Kedungdadi – Moropelang
38. Rekonstruksi Jalan Kembangbahu - Sukobendu
39. Rekonstruksi Jalan Laren - Keduyung
40. Rekonstruksi Jalan Lonjong -Mendolo
41. Rekonstruksi Jalan Mantup - Mojosari
42. Rekonstruksi Jalan Menengai - Wates
43. Rekonstruksi Jalan Pamotan - Sumberdadi
44. Rekonstruksi Jalan Pataan - Sekidang - Sukobendu
45. Rekonstruksi Jalan Sekaran - Sungelebak
46. Rekonstruksi Jalan Soko - Dagang
47. Rekonstruksi Jalan Soko - Karangbinangun



48. Rekonstruksi Jalan Sumberdadi - Sumberkerep
49. Rekonstruksi Jalan Pule - Sarirejo
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.533.026.350 dan terealisasi sebesar Rp. 2.392.477.750,00 atau 43%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) paket pekerjaan dengan panjang 2,356 km, meliputi;
1. Pembangunan TPT Ruas Bakalrejo Gondanglor
 2. Pembangunan TPT Ruas Dermolemahbang - Balongwangi
 3. Pembangunan TPT Ruas Dlanggu - Dinoyo
 4. Pembangunan TPT Ruas Sukobendu - Kedungpring
 5. Rehabilitasi Jalan Poros Strategis Sendangharjo - Brengkok Kec. Brondong
 6. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Kalen –Jatipayak
 7. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Kedungdadi - Moropelang
 8. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Mojorejo - Jegrek
 9. Pembangunan TPT Tlanak - Sumengko
 10. Pemeliharaan Berkala Jalan Bandungsari - Sugihrejo
 11. Pemeliharaan Berkala Jalan Baturono – Karanglangit
 12. Pemeliharaan Berkala Jalan Baturono - Kembangbahu
 13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kawistolegi - Tracal
 14. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebet - Mangkujajar
 15. Pemeliharaan Berkala Jalan Pamotan - Sumberdadi
 16. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukodadi - Plembon
 17. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Di Ruas Jalan Laren-Blimbing
 18. Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Ruas Jalan Mendolo - Mluwur
 19. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Di Ruas Jalan Tawangrejo-Gedongboyountung
 20. Pemeliharaan Berkala di Ruas Jalan Dermolemahbang - Beru
 21. Pemeliharaan Berkala di Ruas Jalan Dradah - Kedungpring
 22. Pemeliharaan Berkala di Ruas Jalan Tikung - Sumberkerep



23. Pemeliharaan Berkala Jalan Di Ruas Jalan Pule - Kedungwaras
 24. Pemeliharaan Berkala Jalan Di Ruas Jalan Sidokumpul -
Tujungmekar
 25. Pemeliharaan Berkala Jalan Mojorejo - Medalem
 26. Pemeliharaan Berkala Jalan Waruwetan – Lebakadi
 27. Pemeliharaan Berkala Poros Desa Dukuhagung - Simbatan
- 5) Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.487.613.726,00 atau 99%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 64 (Enam puluh empat) paket pengadaan bahan jalan, meliputi;
1. Pengadaan Bahan Bahu Jalan
 2. Pengadaan Bahan Coldmix Wilayah Selatan 1
 3. Pengadaan Bahan Coldmix Wilayah Selatan 2
 4. Pengadaan Bahan Coldmix Wilayah Tengah
 5. Pengadaan Bahan Coldmix Wilayah Utara 1
 6. Pengadaan Bahan Coldmix Wilayah Utara 2
 7. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Bakalrejo - Gondanglor
 8. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Bluluk - Sukorame
 9. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Dalam Kota
 10. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Deket - Soko
 11. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Dradah - Bluluk
 12. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Dradah - Kedungpring
 13. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Dumpi - Sukobendu
 14. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Gampang - Peti'in
 15. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Gembong - Dempel
 16. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Jl. Gotong Royong Kota Babat
 17. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Jl. Raya Tambakboyo
 18. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Jl. Surojoyo
 19. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Jl. Syeh Hisyamuddin
 20. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Kalen - Kedungpring
 21. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Karangkembang - Gendongkulon
 22. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Kedungdadi - Moropelang
 23. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Kedungpring - Sukobendu



24. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Kembangbahu - Kalipang
25. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Kembangbahu - Sukobendu
26. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Kiringan - Dibee
27. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Lamongrejo - Garung
28. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Laren - Blimbing
29. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Lonjong - Mendolo
30. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Made - Plembon
31. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Made - Plosowahyu
32. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Mantup - Ayamalas
33. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Mantup - Sambeng
34. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Menengai - Wates
35. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Ngimbang - Bluluk
36. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Ngimbang-Sambeng
37. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Paciran-Godog
38. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Penanjang - Sendangduwur
39. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Peti'in - Banjarwati
40. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Plembon - Sugio
41. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Pucuk - Sekaran
42. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Pule - Sarirejo
43. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sambeng - Garung
44. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sekaran - Laren
45. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Soko - Dagang
46. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Soko - Karangbinangun
47. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Solokuro - Dadapan
48. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sugio - Tlanak
49. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sukodadi - Plembon
50. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sukodadi - Sumberwudi
51. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sukorame - Sembung
52. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sukorame - Slaji
53. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sumberwudi - Karanggeneng
54. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sumberwudi - Maduran
55. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Sumberwudi - Tunjungmekar
56. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Tanjung - Songowareng



57. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Tikung - Kembangbahu
 58. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Tunjungmekar - Samboppinggir
 59. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Turi - Kiringan.
 60. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Bluri - Tlogosadang
 61. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Lamongrejo - Gagantingan
 62. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Mendolo - Mluwur
 63. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Nguwok - Tlanak
 64. Pengadaan Bahan Jalan Ruas Tikung - Sumberkerep
- 6) Penggantian Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.911.899.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.723.816.858,00 atau 69,63%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 15 (Lima belas) paket pekerjaan, yaitu;
1. Penggantian Gorong-gorong Adirejo ruas Jalan Sambeng-Ngimbang;
 2. Penggantian Gorong - gorong Banyu Urip di Ruas Jalan Tunjungmekar – Samboppinggir;
 3. Penggantian Gorong-gorong Butungan ruas Jalan Sumberwudi - Tunjung Mekar;
 4. Penggantian Gorong-gorong di ruas jalan Dumpi - Sukobendu;
 5. Penggantian Gorong-gorong (Ds. Jagran) ruas Jalan Sumberwudi–Maduran;
 6. Penggantian Gorong-gorong Gunungrejo di ruas jalan Kedungdadi–Kradenanrejo;
 7. Penggantian Gorong-gorong Kediren ruas Jalan Sumberwudi-Tunjung Mekar;
 8. Penggantian Gorong-gorong Kramat di ruas Jalan Lopang-Kramat;
 9. enggantian Gorong-gorong Pangean di Ruas Jalan Gembong–Dempel;
 10. Penggantian Gorong-gorong Puncakwangi di Ruas Jalan Karangembang Gendongkulon;
 11. enggantian Gorong-gorong Purworejo di ruas jalan Tanjung-Songowareng;



12. Penggantian Gorong - gorong ruas Jalan Tunjungmekar-Samboppingir;
 13. Penggantian Gorong-gorong Suwoko di Ruas Jl. Suwoko;
 14. Penggantian Jembatan Keber III ruas Jalan Laren–Blimbing;
 15. Penggantian Jembatan ruas Jalan Plaosan – Gendongkulon;
- 7) Rehabilitasi Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.075.868.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 974.621.734,00 atau 46,95%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 4 (empat) unit pekerjaan yaitu:
- 1) Rehabilitasi Jembatan Gegantingan ruas jalan Ngasemlemahbang–Gegantingan;
 - 2) Rehabilitasi Jembatan Lembang Kidul ruas jalan Sumberwudi-Tunjungmekar;
 - 3) Rehabilitasi Jembatan Pule II ruas Jalan Dradah – Bluluk;
 - 4) Rehabilitasi Jembatan ruas Jalan Gampang – Petiin;
- 8) Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 dan terealisasi Rp. 682.931.941,00 atau 97,56%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) unit pekerjaan, yaitu;
- 1) Pemeliharaan Rutin Jembatan Mertani
 - 2) Pemeliharaan Rutin Jembatan Bon Ringin
 - 3) Pemeliharaan Rutin Jembatan Sungelebak
 - 4) Pemeliharaan Rutin Jembatan Keber IV
 - 5) Pemeliharaan Rutin Jembatan Dadapan
 - 6) Pemeliharaan Rutin Jembatan Glagah Kulon
 - 7) Pemeliharaan Rutin Jembatan Ngepoh
 - 8) Pemeliharaan Rutin Jembetan Kebet
 - 9) Pemeliharaan Rutin Jembetan Langan
 - 10) Pemeliharaan Rutin Jembatan Deket (Jl. Syekh Hisyamudin)
 - 11) Rutin Jembatan Puncel 2 (Jl. Syekh Hisyamudin)
 - 12) Pemeliharaan Rutin Gorong-gorong (Jl. Dr. Wahidin)
 - 13) Pemeliharaan Rutin Jembatan Baturono
 - 14) Pemeliharaan Rutin Jembatan Plembon



- 15) Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalikacang
- 16) Pemeliharaan Rutin Jembatan Sekarbagus
- 17) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Puter
- 18) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Gorong-gorong Karang
- 19) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Oro oro Ombo
- 20) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Sambeng
- 21) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Bluluk
- 22) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Nogojatisari II
- 23) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Ngampel
- 24) Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan Nogojatisari I

c) Pendapatan Dinas Pu Bina Marga

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Sewa Alat Berat	85.000.000	85.265.000	85.000.000	85.000.000
2	Penjualan Pohon	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	JUMLAH	90.000.000	90.265.000	90.000.000	90.000.000



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan
2. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan
3. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/ profesionalismenya
4. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak.
5. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan yang mengakibatkan cepatnya kerusakan jaringan jalan..



B. Saran

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Lamongan, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan) agar lebih profesional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Lamongan, Januari 2024

. Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1974093 200112 1 005



LAMPIRAN

Matriks Rencana Strategis

Instansi : DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan
Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrstruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

SASARAN	INDIKATOR		TAHUN DASAR	TAHUN 2022			TAHUN 2023			STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		Ket
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	KEBUAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	1.1	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	79.05	80,74	82,18	101,8	81,62	83,43	102,22	Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan dengan menggunakan konsultan yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU. Bina Marga
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	84.20%	89,01%	83,98%	94,3%	90,33%	87,44%	96,8%			
	2.1	Meningkatnya Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	78.69	76,1	79,51	104,5	77,54	80,38	103,66			
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	83.22%	77,23%	76,18%	98,6%	80,10%	80,10%	100,0%			

KEPALA DINAS PU BINA MARGA
 KABUPATEN LAMONGAN



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**

SKPD : DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan		Indeks Infrastruktur Jalan	81,62	83,43	102,22
			Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	00,33%	87,44%	96,80%
			Indeks Infrastruktur Jembatan	77,54	80,38	103,66
			Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	80,10%	80,10%	100,00%
			Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,28%	-	-
			Nilai IKM Dinas PU Bina Marga	87	87,22	87,22

Jumlah Anggaran Tahun 2023 Sebesar Rp 129.900.368.650,00
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Sebesar Rp 99.586.271.876,00

Program dan Kegiatan		Jumlah Anggaran		Realisasi Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.483.648.200,00	Rp	7.134.131.877,00
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	70.000.000,00	Rp	65.873.550,00
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.807.676.450,00	Rp	4.597.151.404,00
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	179.824.000,00	Rp	179.114.000,00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	560.675.950,00	Rp	552.054.371,00
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	119.514.500,00	Rp	116.628.100,00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.025.924.150,00	Rp	967.206.840,00
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	720.033.150,00	Rp	656.103.612,00
2 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	122.416.720.450,00	Rp	92.452.139.999,00
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	122.416.720.450,00	Rp	92.452.139.999,00
Jumlah Total	Rp	129.900.368.650,00	Rp	99.586.271.876,00

KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUJARWO, S.T., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Desember 2023/

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN**


SUJARWO, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infrastruktur Jalan	81,62
		Indeks Infrastruktur Jembatan	77,54
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,28

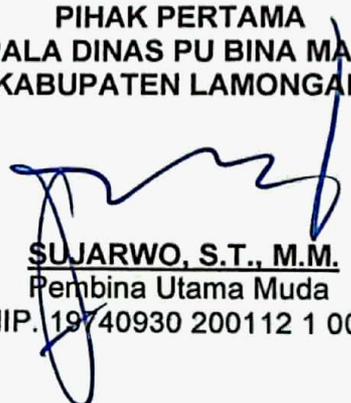
PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 122.416.720.450,00	APBD, DAK, BK-PROP, dan BKK
2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.483.648.200,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 129.900.368.650,00	

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Desember 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN


SUJARWO, S.T., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740930 200112 1 005

**PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINAS P U. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023**



